

# MEMBACA KEMBALI PEMBERONTAKAN PETANI BANTEN 1888 DALAM STRUKTURASI GIDDENS

Masykur Wahid<sup>1</sup>

## Abstrak

*Membaca kembali sejarah berarti merepresentasikan makna yang tersembunyi. Membaca kembali pemberontakan petani Banten 1888 adalah merepresntasikan identitas kaum petani Banten di tengah-tengah penindasan kaum bangsawan dan kolonialisme Belanda. Pada era kesultanan kaum petani dikategorikan sebagai kaum mardika dan abdi yang dijadikan budak dan wajib bayar upeti 10% kepada sultan. Diperparah lagi pada era kolonialisme Belanda, kaum petani selain diperbudak, bayar upeti 20% sampai 33.3% kepada kolonial dan juga dipaksa kerja rodi. Dalam artikel ini fenomena penindasan kaum petani Banten itu kembali dianalisis dengan teori strukturasi Giddens untuk memaknai pemberontakan itu sebagai praktik sosial. Dapat dijelaskan bahwa agensi atau aktor pemberontakan adalah kaum petani. Seperti dikatakan Giddens, yang kompeten bertindak sebagai agensi adalah kaum petani sendiri yang memiliki rencana, program dan mengetahui konsekuensinya. Spiritualitas nilai-nilai tradisional dalam institusi agama hanya sebagai medium untuk melakukan pemberontakan. Sedangkan, kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda yang dominatif dan institusi peradilan yang layu legalitasnya sebagai pemicu kekacauan kondisi sosial dan budaya kaum petani. Karena itu, tidak bisa tidak kaum petani wajib memberontak untuk merebut kembali hak-hak dan identitasnya yang ditindas oleh kolonialisme Belanda (dan kaum bangsawan yang kolonial).*

*Kata kunci: Pemberontakan petani Banten, teori strukturasi Giddens, agensi, strukturasi, dualitas, identitas petani.*

## Pendahuluan

Pemberontakan petani Banten merupakan gerakan sosial dan budaya kaum petani Banten untuk merebut kembali hak-hak bertahan hidup (*survival*) dan identitas diri atas kolonialisme Belanda dan dominasi kaum bangsawan. Pemberontakan terjadi pada hari Senin, tanggal 9 Juli 1888 di wilayah Cilegon, propinsi Banten, Indonesia. Gerakan sosial dan budaya ini dilakukan oleh kaum petani Banten dengan kekuatan nilai-nilai tradisional (agama

---

<sup>1</sup> Dosen di Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

Islam). Kaum petani Banten memberontak terhadap kolonialisme Belanda untuk merebut kembali hak-hak mereka bercocok tanam padi sebagai bahan pokok untuk bertahan hidup. Selain itu, mereka berharap kehidupan dan kematian mereka bermakna dan bernilai sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Sebab itu, menurut Sartono Kartodirdjo, gerakan sosial dan budaya kaum petani Banten ini merupakan pemberontakan tradisional dan regional. Pemberontakan tradisional ini juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia yang lain sebagai akibat pengaruh dominasi kolonial yang semakin kuat pada abad ke-19 (1984: 13).

Kajian lebih analitis, penulis membaca kembali pemberontakan petani Banten melalui karya Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888, Kondisi, Jalan Peristiwa dan Kelanjutannya: Sebuah Studi Kasus mengenai Gerakan Sosial di Indonesia* (1984) dalam kerangka teoritik strukturasi Anthony Giddens. Berkaitan dengan analisis strukturasi Giddens, ada tiga persoalan dalam artikel ini. Pertama, siapa aktor atau agen dalam pemberontakan petani Banten 1888? Kedua, bagaimana strukturasi pemberontakan tersebut terjadi? Ketiga, bagaimana memahami dualitas struktur pemberontakan tersebut terjadi? Sebagai pelengkap analisis, penulis juga menggunakan konsep budaya Jr. William H. Sewell dalam menjelaskan budaya yang melingkupi kaum petani Banten untuk melakukan pemberontakan.

### **Kaum Petani Banten, Agensi Pemberontakan**

Secara konseptual teori strukturasi Giddens dapat dipahami dari praktik-praktik sosial yang dilangsungkan secara terus-menerus (*continuous*) dalam lintas ruang dan waktu (1984: 2). Praktik sosial (*social practices*) yang dimaksud bukan tindakan *extraordinary*, seperti bunuh diri atau konflik kelas sosial, akan tetapi rutinitas yang dilakukan manusia dalam kesehariannya, seperti sarapan, bercengkerama, makan malam, menonton televisi, mengobrol dengan tetangga, dan *daily activities* lainnya. Definisi praktik sosial ini mengasumsikan relasi antara tindakan (*action*) dengan model reproduksi dan transformasi kehidupan sosial (interaksi sosial). Maksudnya adalah hubungan antara tindakan dan interaksi sosial bersifat dualitas, saling melengkapi, bukan dualisme. Tindakan menghasilkan interaksi sosial, sekaligus tindakan dikonstitusi oleh interaksi sosial tersebut. Giddens ingin

membuktikan bagaimana tindakan pelaku (*actor, agent*) terstruktur dalam konteks kesehariannya melalui karakter tindakan dan proses penampakkannya (Thompson, 1984: 238).

Praktik sosial menjadi dasar eksistensi individu dan masyarakat di mana manusia (*agent*) secara aktif memproduksi dan mengembangkan (*reproduction*) kehidupan sosialnya. Dalam praktik sosial ini, seorang agensi sangat otonom karena mengetahui dan mampu memahami arah tindakannya, eksesnya bagi pelaku lain, serta dalam konteks apa tindakan itu dilakukan. Melalui istilah Erving Goffman, Giddens menyebutkan setiap pelaku adalah *knowledgeability agent* yang memiliki pengetahuan tersebut. Pengetahuan pelaku dalam memonitor arah tindakan, akibatnya bagi pelaku lain, serta memonitor konteks tindakan yang disebut sebagai "pemonitoran reflektif atas tindakan" (*reflexive monitoring of action*). Pengetahuan ini sebagai sebuah karakter pelaku untuk memonitor kelangsungan proses sosial secara terus-menerus. Tindakan yang dilakukan selalu bermakna (*purposive action*) karena berlangsung secara terus-menerus dan tak terpisah dari maksud, arti, tujuan, dan alasan tindakan itu dilakukan. Karakter ini mengarahkan pelaku untuk "memperagakan" suatu tindakan dan mengharapkan pelaku lain melakukan hal yang sama. Demikian ini menandakan bahwa sebuah tindakan tergantung upaya rasionalisasi. Yakini, memahaminya sebagai proses dan melekat pada pelaku secara *inherent* (1984: 56).

Praktiknya, pemberontakan sebagai gerakan sosial dan budaya di Banten ini dilakukan oleh kaum petani. Jelas, dalam teori strukturasi Giddens kaum petani inilah sebagai agensi pemberontakan. Kartodirdjo menjelaskan bahwa peristiwa ini bukan merupakan suatu tindakan yang kebetulan di pihak kaum petani yang tidak mengetahui, yang mengamuk sebab fanatisme Islam. Pemberontakan ini telah dipersiapkan dan direncanakan secara terstruktur melintasi ruang dan waktu (1984: 256). Walhasil, pada hari Senin tanggal 9 Juli kota Cilegon menjadi arena kekerasan berdarah dan mengerikan. Kekerasan dan kekacauan terjadi sepanjang hari. Hampir semua pejabat terkemuka di Cilegon menjadi korban akibat pemberontakan kaum petani. Dalam konteks ini kekuasaan asing benar-benar berhadapan dengan kekuatan pemberontak (1984: 306). Dari peristiwa ini, kaum petani menyadari betul secara diskursif (*discursive consciousness*) atas tindakan memberontak tersebut yang memiliki konsekuensi-konsekuensi

tertentu. Giddens mengatakan bahwa agen atau aktor adalah *while competent actor can nearly always report discursively about their intentions in, and reasons for, acting as they do, they cannot necessarily do so of their motives* (1986: 126).

Pemberontakan kaum petani dipersiapkan secara terstruktur dan sistematis dengan strategi, taktik dan pertimbangan dalam pertemuan-pertemuan selama enam bulan. Pertemuan dilakukan di beberapa rumah para kiyai terkemuka di Banten Utara (Kartodirdjo, 1984: 280). Sedangkan, perencanaan awal pemberontakan di desa Saneja yang berbatasan dengan wilayah Cilegon. Arti, tujuan, target pemberontakan kaum petani di wilayah Cilegon. Terutama, Cilegon merupakan ibukota *afdeling* Anyer, pusat pemerintahan. Selain itu, sebagai wilayah tempat tinggal pejabat-pejabat pamongpraja, Eropa dan pribumi, mulai dari asisten residen, kontrolir muda, patih, wedana, jaksa, asisten wedana, ajun kolektor, kepala penjualan garam dan hingga pejabat-pejabat lainnya tingkat bawah dalam birokrasi kolonial (1984: 301). Dengan demikian sebelum pemberontakan, kaum petani telah menyadari kondisi-kondisi sosial dan budaya yang kacau balau, penyelewengan-penyelewangan administratif, dan administrasi yang tidak efektif dalam bidang ekonomi dan politik akibat kolonialisme Belanda dan dominasi kaum bangsawan. Selanjutnya setelah pemberontakan terjadi, kaum petani juga menyadari akan banyak mengorbankan jiwa manusia demi kehidupan yang tentram dan tertib.

### Strukturasi Pemberontakan

Struktur menurut Giddens adalah seperangkat aturan (*rules*) dan sumberdaya (*resources*) yang diproduksi dan direproduksi di dalam praktik sosial terus-menerus. Arti struktur demikian ini merupakan kritiknya atas asumsi dasar fungsionalisme yang mengatakan bahwa struktur adalah dimensi eksternal yang mengekang kebebasan individu dan tindakannya (1976: 125-126). Sebagai aturan dan sumberdaya, struktur merupakan pola atau komponen relasi sosial yang memproduksi struktur interaksi. Pemahaman ini berangkat dari pra-konsepsi bahwa sistem sosial merupakan bentuk interaksi yang teratur yang mengandung sejumlah struktur. Dalam pemikiran Giddens juga, sistem sosial (praktik sosial) terdiri dari sejumlah struktur, yaitu aturan dan sumber daya. Struktur diproduksi melalui aktifitas-aktifitas praktis

dalam interaksi sosial, sehingga eksistensinya dapat bersifat mengekang tindakan untuk melakukan sesuai dengan konteks dan aturan tertentu. Selain itu, struktur dapat pula memberikan stimulus untuk memproduksi dan mereproduksi praktik sosial secara luas. Setiap kejadian tindakan terbentuk dan membentuk struktur ini dalam sebuah praktik sosial. Karena kejadian tindakan dilakukan dalam konteks ruang dan waktu, secara otomatis aturan dan sumberdaya ini men-strukturisasi tindakan dalam praktik sosial dalam lintasan ruang dan waktu pula. Karenanya, struktur menjadi modalitas (*structuring properties*) yang mengikat ruang dan waktu dalam sistem sosial. Dengan modalitas ini, praktik sosial menjadi mungkin dilakukan melintas ruang dan waktu jika strukturnya berbentuk *virtual order*. Kata lain, ketika struktur mengambil bentuk *virtual order*, praktik sosial hanya mempertontonkan modalitasnya (*structural properties*) di mana keberadaannya menjadi tauladan (*instantiation*) dan *memory traces* dari praktik sosial. Pengetahuan yang mendasari terjadinya praktik sosial itu dapat dipahami oleh pelaku *hic et nunc*, karena adanya pengaturan pengetahuan (*the conduct of knowledgeable human agents*) (1979: 64-66).

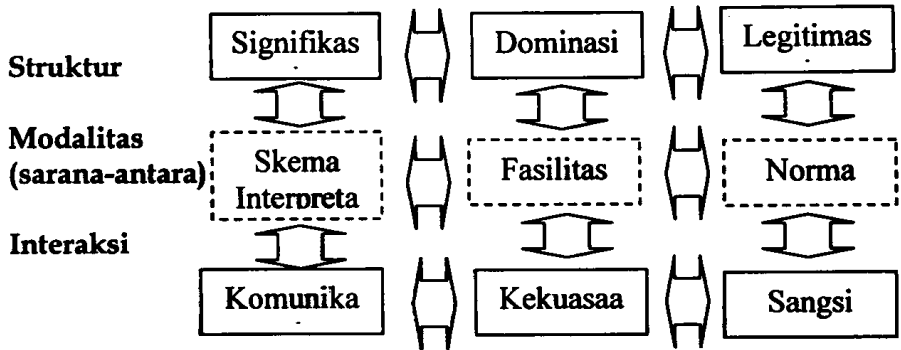
Berkaitan dengan aturan, Giddens mengutip pemikiran Ludwig Wittgenstein tentang *rule-following action*. Yakni bahwa setiap tindakan selalu mengikuti aturan yang berlaku. Seorang pelaku yang secara teratur melakukan aktifitas dalam konteks dan waktu tertentu, dapat memahami bagaimana aturan diberlakukan dalam konteks itu. Memahami aturan sebuah permainan berarti mengetahui bagaimana cara memainkannya berdasarkan aturan. Mengetahui aturan matematika dalam menghitung angka-angka berarti mengetahui bagaimana aturan rangkaian angka dilanjutkan, menambah, mengurangi, mengalikan, atau membagi. Dengan kata lain, pemahaman terhadap aturan memungkinkan pelaku mengembangkan secara luas aturan itu dalam proses tindakannya. Meski demikian, mengetahui seperangkat aturan tidak berarti harus mampu merumuskannya. Setiap aturan yang banyak dan kompleks menempati ruang kesadaran praktis (*practical consciousness*) pelaku dan secara terus-menerus ditransformasikan dalam kesadaran dan mampu dikonseptualisasikan (1984: 21).

Aturan tersebut dalam pemahaman Giddens adalah medium dan sekaligus hasil dari proses reproduksi praktik sosial, "*rules as media and outcome of the reproduction of social system*" (1979: 65). Aturan hanya dapat dipahami ketika pelaku melakukan sebuah

tindakan secara *recursive* dalam praktik-praktik sosial. Dalam pemahaman ini, relasi aturan dan tindakan tidak pernah tunggal. Aturan selalu terlibat dan dilibatkan dalam praktik sosial yang diekspresikan secara utuh melalui tindakan. Sebab itu, relasi aturan dan tindakan adalah melakukan konstitusi praktik sosial dalam konteks waktu. Misalnya, tindakan sarapan dilakukan berdasarkan aturan di rumah dan di pagi hari. Di samping itu, sebuah aturan tidak dapat dipahami secara utuh dalam kesendiriannya baik sebagai perintah, larangan, ancaman, dan lain-lain. Keberadaannya bermakna jika dikaitkan dengan tindakan tertentu yang menggambarkan pola itu. Dengan kata lain, aturan dan tindakan saling menggabungkan satu sama lain. Selain aturan, konsep struktur juga berkaitan dengan sumberdaya. Sumberdaya dipahami sebagai *structural properties* yang berkenaan dengan kapasitas pelaku untuk mengembangkan relasi kuasa dalam praktik sosial (1979: 68-69). Giddens mengaitkan sumberdaya dengan konsep "institusi" sebagai kumpulan praktik sosial yang membentuk sistem sosial. Institusi merupakan karakter khas kehidupan sosial dalam jangka waktu lama (*the more enduring features of social life*). Dengan demikian, institusi menjadi *structural properties* dari sistem sosial. Yakni, praktik sosial dalam lintas ruang dan waktu yang dipadatkan (*solidity*) dalam sebuah institusi.

Pada saat aturan bersifat transformatif dan sumberdaya bersifat mediatif, strukturasi menurut Giddens, membuat relasi transformasi dan mediasi sehingga dimungkinkan terjadinya proses reproduksi kehidupan sosial. Tentunya, relasi antara aturan dan sumberdaya bersifat dualitas di mana keduanya menjadi mediator dan sekaligus menjadi hasil dari praktik sosial yang dilakukan secara *recursive* (1979: 25). Menurut Giddens, relasi dualitas ini dilakukan dengan dua cara. Pertama, "*structure, as recursively organized sets of rules and resources, is out of time and space... and is marked by an absence of the subject*, struktur diorganisir secara *recursive* di luar konteks ruang dan waktu serta meniadakan subyek. Dan kedua, *social system...comprise the situated activities of human agents, reproduced across time and space*, sistem sosial mengintegrasikannya kembali dalam lintas ruang dan waktu (1979: 25). Dapat dipahami bahwa struktur adalah *langue* yang mengatasi realitas dan *decentring of subject*. Sedangkan, sistem sosial adalah *parole* yang erat dengan lintas ruang dan waktu. Hal ini dapat dimaknai bahwa struktur bukan merupakan produk subyek dan tidak pula diorientasikan pada subyek tertentu. Struktur mempunyai makna dan

eksistensinya ketika pelaku mempraktikkan tindakannya melalui implementasi aturan dan sumberdaya. Secara skematis teori strukturasi Giddens pada dasarnya menjelaskan ada tiga prinsip struktural: "penandaan" (*signification*), "penguasaan" (*domination*), dan "pembenaran" (*legitimation*). Kaitan antara tiga prinsip struktural ini berikut ini (1986: 136):



Dengan begitu, strukturasi Giddens menegaskan bahwa relasi agensi dan struktur adalah relasi dualitas (*duality*), bukan dualisme. Dualitas terjadi dalam "*reproduced social practices*" dalam "*across time and space*" (186: 130). Struktur yang dimiliki oleh kaum petani adalah aturan birokrasi-administratif kolonial dan sumberdaya yang berupa sumberdaya alokatif (tanah pertanian) dan sumberdaya otoritatif (nilai-nilai tradisional, Islam) dalam praktik-praktik sosial. Dalam struktur ini pemberontakan dilakukan oleh kaum petani terjadi akibat aturan birokrasi-administratif kolonial yang mengekang (*constraining*) dan tidak memberdayakan (*enabling*) kinerja mereka, seperti wajib pajak kepala (upeti) dan kerja rodi yang banyak dibebankan pada mereka. Pelaksanaan pajak kepala, aturan-aturan tentang kerja rodi, dan klasifikasinya tidak disangsikan lagi sangat memengaruhi kehidupan kaum petani yang menyebabkan timbulnya kerusuhan-kerusuhan di daerah-daerah pedesaan. Karenanya, satu-satunya strategi untuk bertindak terhadap efek yang mengacaukan institusi-institusi tradisional adalah memobilisasi kaum petani dan melawan dominasi kekuasaan kolonial. Nilai-nilai keislaman digunakan untuk menguatkan nilai-nilai tradisional dalam memberontak pengaruh-pengaruh kolonial yang melanggar dan merongrong keefektifan norma-norma tradisional (Kartodirdjo, 1984: 34-38).

Di samping itu, pemberontakan kaum petani terjadi karena

adanya dominasi dan penindasan dari kekuasaan kolonial Belanda dan kaum bangsawan terhadap sumberdaya kaum petani. Dalam sumberdaya alokatif, kaum petani yang menggarap sawah negara atau tanah milik sultan terbagi menjadi dua kategori. Pertama, kaum petani *mardika*, orang-orang yang telah diberi status sebagai orang merdeka, karena mereka telah menyatakan tunduk kepada kaum penakluk dan memeluk agama Islam. Kedua, kaum *abdi* yang telah ditaklukan dengan kekerasan dan dijadikan budak. Sawah negara sesungguhnya adalah semua sawah yang telah dibuka atas perintah sultan atau anggota keluarganya yang telah dihadiahi tanah itu, sehingga sawah itu menjadi miliknya. Sawah negara yang meliputi daerah-daerah dataran rendah sekitar Teluk Banten dibagi-bagikan kepada petani dengan syarat bahwa mereka menggarapnya dan membayar upeti kepada sultan sebesar sepersepuluh dari hasilnya (10%). Namun realitasnya, *privilese* untuk menggunakan tanah milik sultan itu direlaskan dengan kutipan pajak atas hasil panen dan kewajiban melakukan kerja bakti (*rodi*) untuk sultan. Karena itu, para penggarap (petani) dapat diusir dengan sewenang-wenang (*otoriter*). Meskipun, para penggarap juga dapat meninggalkan garapan mereka kapan saja mereka mau. Lalu, pada tahun 1808 Daendels menghapuskan tanah-tanah milik sultan dan mewajibkan kerja bakti (*rodi*) yang melekat pada tanah-tanah itu dengan pungutan seperlima bagian dari hasil panen (20%) sebagai pajak tanah untuk seluruh daerah dataran rendah di Banten. Beberapa tahun kemudian, Raffles menjadikan sewa tanah sebagai satu-satunya pajak tanah. Dalam perjalanan waktu, hak-hak yang turun-temurun atas sawah negara ... menjadi sumber-sumber korupsi dan penyelewengan di kalangan pamongpraja (Kartodirdjo, 1984: 58-61).

Reaksi kaum bangsawan terhadap aturan-aturan kolonial Belanda tersebut terjadi. Dalam diri anggota-anggota kerabat sultan dan pejabat-pejabat kesultanan, orang-orang yang paling menghendaki kembalinya kebiasaan-kebiasaan tradisional, mereka berusaha memertahankan hak-hak mereka, meskipun mereka sudah menerima ganti-ruginya. Selain itu, orang-orang yang telah dianugerahi tanah oleh sultan, dengan gigih menentang diberlakukannya aturan-aturan tersebut, karena bagi mereka hal itu akan menyebabkan kehilangan banyak pengaruh politik. Sebab itu, aturan-aturan tersebut telah menimbulkan banyak rasa tidak puas baik bagi kaum bangsawan ataupun kaum petani. Hal ini dianggap sebagai sumber kerusuhan-kerusuhan di Banten sampai tahun 1830.



Bahkan, laporan mengenai hak atas tanah di Banten pada tahun 1870 memberikan deskripsi yang jelas mengenai kasus-kasus di Banten Utara. Pembagian tanah negara di Kadikaran menyingkap secara lebih menyolok lagi penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh kaum elit dan bangsawan. Dari enam belas (16) bau sawah negara, empat (4) bau diberikan kepada kepada desa untuk keperluan resmi, dua (2) bau diusahakan oleh *patih* Lebak sebagai kebun kelapa, tiga (3) bau diberikan kepada *jaksa kepala*, sedangkan penduduk desa hanya mendapatkan tujuh (7) abu setelah dipecah-pecah menjadi 28 bagian. Penyelewengan lainnya yang menarik adalah pegadaian sawah. Dilaporkan bahwa Jayakusuma, setelah dipecat sebagai *patih* Lebak, menganjurkan kepada rakyat di distrik Ciruas agar mereka menggadaikan sawah mereka kepadanya. Diperparah lagi, dengan cara-cara transaksi tanah lainnya yang ketika itu sudah terdapat di Banten adalah menjadikan tanah sebagai jaminan, dan persetujuan bagi hasil, yang masing-masing disebut *nglanjak* dan *memaro* atau *mertelu* (33,3%) (1984: 61-65).

Seorang pengamat membenarkan kecemasan kaum petani Banten dengan menunjukkan bahwa penindasan yang terus-menerus terhadap mereka di atas. Sedangkan sumberdaya kaum petani pada masa kolonialisme Belanda, petani hanya memiliki hak sewa yang pembayaran pajak lebih besar daripada pada masa kesultanan. Dan diparah lagi, dengan kerja rodi bagi kaum petani, seperti menjaga rumah anggota-anggota pamongpraja, membersihkan kebun-kebun mereka, mencari kayu bakar bagi mereka, mencari rumput untuk kuda-kuda mereka dan sebagainya (1984: 68). Struktur demikian itu terjadi berulang-ulang (*recursive*) dalam kehidupan sehari-hari kaum petani. Dalam kondisi sosial dan budaya yang terus-menerus mengekang, rasa tidak puas, kaum petani menyadari untuk memaknai relasi yang dominatif dengan pejabat-pejabat kolonial dengan legitimasi nilai-nilai tradisional untuk *ber-jihad fi sabilillah* melawan kolonial. Dan, proses pemaknaan terhadap kekacauan sosial dan budaya itulah, pemberontakan sebagai tindakan untuk memenuhi rasa tidak puas terhadap kolonialisme Belanda dan kaum bangsawan dengan kekuatan nilai-nilai keislaman untuk berperang melawan kekuasaan kolonial yang dominatif.

## Identitas Petani, Dualitas Struktur Pemberontakan

Dualitas struktur pemberontakan terlihat dalam struktur sosial dan budaya kaum petani Banten yang berbeda dengan struktur sosial dan budaya kolonial pada satu sisi. Pada sisi lain berbeda kaum petani juga dengan struktur sosial dan budaya kaum bangsawan (keturunan sultan dan ahli agama yang dahulu sebagai pejabat kesultanan). Budaya kaum petani sebagai golongan bawahan baik dalam hirarki kesultanan, kaum elite politik, maupun kolonialisasi Belanda. Sewell Jr menjelaskan bahwa *culture as system and practice* (2005: 84). Budaya kaum petani memiliki budaya yang otonom dalam praktik-praktik sosial. Nah, pemberontakan petani Banten terjadi akibat terjadinya kontestasi antara budaya bawahan dan budaya bangsawan dalam memenuhi kebutuhan hidup, meskipun keduanya juga bersama-sama melawan dominasi budaya kolonial. Dengan kata lain, pemaknaan budaya tradisional (nilai-nilai Islam) menjadi kontestasi bagi kaum petani sebagai identitas diri mereka. Sehingga, pemberontakan terjadi diakibatkan oleh identitas kaum petani yang ditindas dan dipinggirkan oleh dominasi kaum bangsawan dan kolonial Belanda.

Dualitas kaum petani dan kaum elit-bangsawan tampak pula di dalam pembaruan-pembaruan agraris menyangkut pemungutan sewa tanah. Seperti, yang sering dilaporkan oleh para pejabat, pembagian beban pajak telah disalah gunakan oleh para *jaro*. Elit pedesaan berada dalam kedudukan yang kuat untuk membayar relatif kecil, karena mereka dapat melakukan tekanan terhadap pejabat-pejabat desa untuk mengurangi bagian pajak yang harus mereka bayar. Akibatnya, rakyat biasa, kaum petani, harus memikul beban yang lebih berat. Begitu juga, mengenai penetapan pajak perdagangan. Meski sulit diketahui dalam konteks memperbesar ketegangan di kaum petani (kalangan pedesaan), namun menarik perhatian adalah bahwa sebagian kaum pemberontak berasal dari daerah pedesaan. Yakni, daerah Nyamuk, Beji dan Bojonegara, asal pemimpin-pemimpin pemberontakan yang paling terkemuka, Haji Wasid dan Haji Mahmud. Djajadiningarat menyebutkan bahwa Bojonegara sangat dikenal sebagai tempat pencuri-pencurinya, penyelundup-penyelundupnya dan pelacur-pelacurnya. Selain itu, pajak pasar yang dikenakan pada pajak perdagangan di Cilegon. Pajak pasar itu telah memperberat beban pajak di daerah itu (Kartodirdjo, 1984: 90-92). Dengan begitu, identitas kaum petani tumbuh melalui dualitas struktur yang dominatif (menindas) terus-

menerus dari kaum elit-bangsawan dan kolonialisme Belanda.

## **Kesimpulan**

Pemberontakan petani Banten pada tanggal 9 Juli 1888 di Cilegon, Banten Utara, terjadi sebagai praktik sosial yang direproduksi akibat kondisi sosial dan budaya yang dikacaukan oleh struktur tindakan kaum bangsawan dan kolonialisme Belanda. Pemberontakan sebagai gerakan sosial budaya kaum petani Banten merupakan reproduksi kaum petani yang tentram dan tertib sebagai identitas kaum bawahan. Identitas kaum petani yang sadar dan peduli terhadap relasi sosial, budaya, ekonomi dan politik dengan golongan yang lain dalam stratifikasi sosial. Dalam strukturasi Giddens, identitas kaum petani tersebut menyadari eksistensi dirinya sebagai kaum petani untuk mereproduksi tanaman padi, sayuran dan palawija dan tanaman lainnya, tidak dicampuri dengan praktik sosial yang menindas dan karup dari kaum bangsawan dan kolonialisme Belanda. Dengan demikian, jelas teori strukturasi mengukuhkan bahwa keberadaan budaya sebagai sistem dan praktik dalam kehidupan manusia adalah otonom. Dari pembacaan ini, diharapkan bahwa budaya apa pun yang direproduksi masyarakat Banten perlu diimbangi dengan aturan yang adil dan sumberdaya partisipatif dan berpri-kemanusiaan.

## Daftar Bacaan

Giddens, Anthony. 1976. *New Rules of Sociological Method*. Cambridge: Polity Press.

\_\_\_\_\_. 1979. *Central Problems in Social Theory*. London: Macmillan.

\_\_\_\_\_. 1984. *The Constitution of Society*. Cambridge: Polity Press.

\_\_\_\_\_. 1986. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press.

Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888, Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya: Sebuah Gerakan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Sewell Jr., William H. 2005. "The Concept(s) of Culture", dalam Spiegel, Gabrielle M. (ed.), *Practicing History*. New York: Routledge.

Thompson, John B. 1984. *Study in the Theory of Ideology*. California: University of California Press.